

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, karena informasi yang dihasilkan masih menjadi dasar pengambilan keputusan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kualitas laporan keuangan pemerintah ditentukan oleh karakteristik tertentu yang menjadi persyaratan normatif dalam penyusunannya. Karakteristik tersebut diperlukan agar mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, yaitu informasi yang relevan, handal, bisa dibandingkan, serta bisa dipahami. Menurut PSAK 1 Laporan keuangan yaitu informasi yang tersusun secara teratur terkait posisi keuangan serta pencapaian kinerja entitas. Kualitas laporan keuangan dapat dinilai pada dasar kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, akurasi data yang disajikan, serta kemudahan dalam memahami informasi yang disediakan (Lestari & Priyadi, 2017).

Kualitas laporan keuangan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai suatu keberhasilan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Karena laporan keuangan yang baik mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik, yang sangat penting bagi pengambilan keputusan serta meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan LKPD memerlukan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP), bertujuan menyediakan jaminan yang memadai bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dilaksanakan secara optimal, laporan keuangan disusun secara akurat dan dapat dipercaya, aset negara terlindungi dengan baik, serta seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Buteikienè, 2008:8).

Penyusunan laporan keuangan juga harus bersifat transparan. Menurut Tanjung (2011), Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Teknologi informasi ialah sarana yang digunakan untuk mengelola data melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengorganisasian, dan penyajian data menjadi informasi yang bernilai. Informasi yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan yang efektif (Naibaho, 2017).

Menurut Afirizal (2014:5), Kualitas sumber daya manusia ialah faktor penentu keberhasilan organisasi. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dalam organisasi juga semakin meningkat untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal. Oleh karena itu, pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan berbagai fungsi internalnya.

Selain itu, komitmen organisasi adalah tingkat keterikatan seorang individu mencakup rasa tanggung jawab terhadap organisasi tempat ia bekerja. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi merujuk pada keseriusan manajemen dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas laporan keuangan (Suseno & Sugiyanto, 2015).

Namun SKPD di Kabupaten Aceh Utara, masih mengalami beberapa permasalahan terkait hambatan dan kendala untuk mencapai target yang ditetapkan, diantaranya: 1. Masih terdapat data wajib pajak yang belum valid; 2. Masih terdapat Geuchik/pihak kecamatan yang tidak memberikan harga rill/sebenarnya pada proses BPHTB; 3. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak; 4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pencapaian target, seperti komputer dan mobil operasional; 5. Belum adanya regulasi terhadap objek pajak air tanah. (LKPD Aceh Utara 2024).

Dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) pemerintah Kabupaten Aceh Utara menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 sejak tahun 2015-2024, dimana ditahun sebelumnya mereka memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LHP dari BPK. Pencapaian ini menandakan tahun ke sepuluh berturut-turut Aceh Utara menerima opini WTP atas laporan keuangan. Walaupun memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Namun, BPK menyebutkan bahwa masih ditemukannya permasalahan pada Kabupaten Aceh Utara, yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang masih perlu ditingkatkan yaitu sebagai berikut:

Program Studi Akuntansi

1. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa senilai lebih dari Rp 8,8 Miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
2. Kekurangan volume atas 38 paket pekerjaan senilai lebih dari Rp 1 miliar. (Disdikbud Rp 582 jt, Dinkes Rp 418 jt, dan Dinas PRKP Rp 45 jt). (LHP Aceh Utara, TA 2024)

Karena Opini WTP tidak menjamin bahwa tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan, melainkan hanya menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan mendukung penyelenggaraan manajemen keuangan pemerintah yang terbuka dan akuntabel.

Tabel 1.1
Perolehan Opini BPK Atas Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Utara

Perolehan Opini BPK											
Aceh Utara	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : LKPD-acehutama, 2025

Penelitian terkait pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebelumnya telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti diantaranya, Muliani *et al.* (2023); Aziyah & Yanto (2020), hasil penelitian mengatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terkait pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebelumnya telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti diantaranya, Zubaidah & Nugraeni (2023); Rahayu & Dewi (2022), hasil penelitian mengatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terkait pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebelumnya telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti diantaranya, Ridzal *et al.* (2022); Harpidalinda *et al.* (2024), penelitian Ridzal *et al.* (2022) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Harpidalinda *et al.* (2024) mengatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan tidak signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terkait pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebelumnya telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti diantaranya, Veronika & Atmadja (2024); Pratiwi & Sujana (2024), hasil penelitian mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terkait pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebelumnya telah dilaksanakan beberapa peneliti diantaranya, Harpidalinda *et al.* (2024); Aziyah & Yanto (2020), hasil penelitian mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini yaitu pengembangan dari peneliti terdahulu. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara.

Dari hasil pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian dengan judul “pengaruh sistem pengendalian intern, transparansi, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang akuntansi dan keuangan, mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pentingnya sistem pengendalian intern, transparansi, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi atas pengambilan keputusan yang mendorong penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi, masukan, dan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji faktor- faktor yang mendorongnya kualitas laporan keuangan yang lebih baik.